

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut disusunlah sebuah sistem pendidikan yang merupakan keseluruhan komponen pendidikan saling terkait secara terpadu. Komponen pendidikan yang dimaksud diantaranya adalah peserta didik, pendidik, materi, alat dan fasilitas pendidikan, metode pendidikan, dan lingkungan pendidikan yang harus dipersiapkan penyelenggaraannya di masyarakat.

Pendidikan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses pendidikan dengan ketentuan (layanan, program, sumber daya) dari semua lembaga, identifikasi masyarakat dilakukan dengan cara kooperatif dan terkoordinasi, menyediakan semua kebutuhan belajar semua masyarakat, mengembangkan masyarakat dan untuk memecahkan masalah masyarakat (Pretorius, 1990, hlm. 515). Seiring dengan hal tersebut, maka program pendidikan yang dibuat mengacu pada peningkatan kualitas dan kebermaknaan program, sehingga program tersebut akan betul-betul bermakna bagi kehidupan masyarakat, diakui keberadaannya dan dapat memberdayakan masyarakat, serta dapat menjadi pilihan bagi masyarakat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas hidupnya.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, salah satunya menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memprioritaskan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa peran serta pendidikan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sangatlah berarti mulai dari penyelenggaraan hingga penjaminan mutu layanan bahkan dalam salah satu pasal dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20

tahun 2003 bahwa hak masyarakat terkait dengan pendidikan adalah berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Salah satu layanan pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut” (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Satu dekade terakhir ini perkembangan PAUD sangatlah pesat, dimana hampir di setiap desa/kelurahan minimal terdapat satu layanan PAUD. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam bukunya Statistik PAUD tahun 2019-2020, jumlah sekolah yang menyelenggarakan layanan PAUD pada tahun ajaran 2019-2020 di Indonesia sebanyak 202.991 yang terdiri dari 4.215 sekolah negeri dan 198.479 sekolah swasta. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 666.678 orang yang terdiri dari 310.596 orang berijazahkan di bawah S1 dan 356.082 orang berijazahkan S1 (multi jurusan). (Tarida dan Khadafy, 2020, hlm. 1)

Khusus untuk provinsi Jawa Barat, jumlah sekolah yang menyelenggarakan layanan PAUD pada tahun ajaran 2019-2020 sebanyak 28.805, terdiri dari 8.998 Taman Kanak-kanak (TK), 13.149 Kelompok Bermain (KB), 155 Taman Penitipan Anak (TPA), 6.503 Satuan PAUD Sejenis (SPS). Berdasarkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) pada masing-masing jenis satuan pendidikan terdiri dari 36.410 orang (TK), 41.155 (KB), 587 (TPA), dan 22.038 (SPS) sehingga jumlah total pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 100.190. (Tarida dan Khadafy, 2020, hlm. 2-4)

TK di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 8.998 satuan, berdasarkan status sekolah terdiri dari 93 (negeri), dan 8.905 (swasta). Berdasarkan akreditasi terdiri dari 1.069 (terakreditasi A), 2.065 (terakreditasi B), 486 (terakreditasi C), 9 (terakreditasi), 460 (belum terakreditasi), dan 4.909 (tidak terakreditasi). Berdasarkan jenis PTK terdiri dari 8.249 (kepala sekolah), 26.100 (guru), dan 2.061

(tenaga kependidikan, jumlah total 36.410 orang. Berdasarkan ijazah tertinggi terdiri dari 11.222 orang dibawah S1, dan 25.118 orang di atas S1. Berdasarkan latar belakang bidang studi terdiri dari 18.329 orang (berlatarbelakang bidang studi PAUD) dan 17.303 orang (berlatarbelakang bidang studi bukan PAUD). (Tarida dan Khadafy, 2020, hlm. 7)

PAUD nonformal di Jawa Barat yang berjumlah 19.807 satuan, berdasarkan akreditasi terdiri dari 117 (terakreditasi A), 622 (terakreditasi B), 688 (terakreditasi C), 309 (terakreditasi), 1.840 (belum terakreditasi), dan 16.231 (tidak terakreditasi). Berdasar jenis PTK terdiri dari 15.619 (kepala sekolah), 43.150 (guru), dan 4.463 (tenaga kependidikan), jumlah total 636.232 orang. Berdasarkan ijazah tertinggi terdiri dari 42.472 orang sekolah menengah kebawah, 3.017 Diploma, 17.848 orang S1, dan 443 orang S2/S3. Berdasarkan latar belakang bidang studi terdiri dari 19.098 orang berlatarbelakang bidang studi PAUD, 42.316 orang berlatarbelakang bidang studi bukan PAUD, dan 2.366 berlatarbelakang lainnya. (Tarida dan Khadafy, 2020, hlm. 53)

Secara umum data di atas memperlihatkan bahwa jumlah satuan pendidik yang ada di Indonesia beserta jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang aktif berperan serta dalam pemberian pelayanan PAUD pada masyarakat. Komposisi pendidik dan tenaga kependidikan dilihat dari kualifikasinya secara nasional sebanyak 47% masih berada di bawah standar nasional pendidikan. Secara khusus data di wilayah provinsi Jawa Barat apabila dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan khususnya terkait dengan kualifikasi PTK menyatakan bahwa 57% masih berada di bawah standar. (Tarida dan Khadafy, 2020)

Berdasarkan hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi standar pendidikan dari sisi PTK diantaranya dengan mendongkrak kompetensi para PTK melalui pelatihan. Mengingat jumlah sasaran pelatihan yang tersebar di berbagai pelosok dengan jumlah yang sangat besar, maka dibutuhkan suatu upaya pengembangan TIK dalam peningkatan kompetensi PTK PAUD.

Teknologi informasi pada abad 21 berkembang dengan sangat pesat yang menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dalam dunia pendidikan yang menuntut para penggiat pendidikan untuk memiliki keterampilan esensial yang

inovatif. Pembelajaran inovatif berorientasi pada kegiatan yang menuntun untuk berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pada abad 21 ditandai dengan banyaknya informasi yang tersedia dimana saja dan dapat diakses kapan saja, otomatisasi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin, komputerisasi yang semakin cepat, serta komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja (Abdulhak, I dan Riyana, C, 2017, hlm. 13).

Abad ke-21 adalah abad pengetahuan yang mengharuskan manusia sadar akan pentingnya pendidikan dan permasalahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, manusia harus memiliki kemampuan yang cukup. Kemampuan tersebut diantaranya: (1) kemampuan dasar (*basic skills*), (2) kemampuan komunikasi (*communication skills*), (3) kemampuan berpikir kritis dan kreatif (*critical and creative thinking skills*), (4) pengetahuan informasi/digital (*information/digital literacy*), (5) kemampuan bertanya dan memberi alasan (*inquiry/reasoning skills*), (6) kemampuan diri sendiri (*interpersonal skills*), (7) pengetahuan multibudaya/multibahasa (*multicultural/multilingual skills*), (8) kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving skills*), dan (9) kemampuan teknologi (*technology skills*). (Abdulhak, I dan Riyana, C, 2017, hlm. 11)

Salah satu cara untuk dapat ikut berperan dalam memasuki dunia abad pengetahuan adalah dengan merekayasa model pembelajaran yang akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dengan didukung penyiapan sumber daya manusia yang potensial dan memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan abad 21. Urgensi pengembangan sumber daya manusia ini terutama untuk mengurangi antara kelompok masyarakat yang masih gagap pengetahuan dengan yang sadar teknologi. Pendidikan dewasa ini bertujuan untuk membangun masyarakat berpengetahuan yang tidak hanya menguasai literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan literasi informasi, tetapi juga melalui proses berfikir dalam memanfaatkan, memperdalam, menciptakan, menemukan dan mendiseminasikan pengetahuan kepada masyarakat luas.

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia dapat dilihat berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2017 yang

dilansir Deutsche Welle (<https://ikompi25.blogspot.com/2018/07/aduh-peringkat-pendidikan-indonesia.html>) menunjukkan bahwa peringkat pendidikan Indonesia saat ini berada di urutan kelima diantara negara-negara ASEAN dan berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. Sebanyak 44% penduduk Indonesia telah menuntaskan pendidikan menengah, sementara 11% murid gagal menuntaskan pendidikan atau dengan kata lain keluar dari sekolah. Secara umum kualitas pendidikan di tanah air berada di bawah negara Palestina, Samoa dan Mongolia. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan banyak cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi global tanpa meninggalkan konteks kearifan lokal. Semua negara berusaha untuk beradaptasi dengan konteks kehidupan modern dengan membentuk komunitas yang unggul serta berdaya saing terutama dalam aspek pendidikan baik secara formal, nonformal, maupun informal. Oleh karena itu, negara perlu membuat suatu kebijakan yang terkait dengan penjaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk mencetak SDM yang bermutu, unggul dan berdaya saing.

Indonesia sebagai negara berkembang melakukan upaya adaptasi terhadap tuntutan dunia terhadap sistem pendidikan melalui pengembangan standar paradigma pendidikan nasional abad 21 yang terkait prinsip dasar dan filosofis penyelenggaraan pendidikan baik secara formal, nonformal, maupun informal. Oleh karena itu dirancang suatu pembelajaran inovatif yang memberikan pengetahuan yang kompleks yang diiringi dengan keterampilan praktis, keterampilan dalam menggunakan informasi, media, serta teknologi yang membantu peningkatan kompetensi. Kebijakan terkait standar pendidikan dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk semua sasaran dan tingkatan usia peserta didik. Hal ini sesuai dengan target penyediaan pendidikan berkualitas yang menjadi poin keempat dari tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Target ini biasa disebut agenda pendidikan 2030, salah satunya menargetkan seluruh anak-anak mendapatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau pendidikan pra-SD, melalui program wajib PAUD satu tahun pra SD. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang standar pelayanan minimal bagi anak usia dini yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah

(PP) No 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu anak usia 5-6 tahun harus masuk lembaga PAUD dan bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai salah satu upaya penyiapan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing dengan masyarakat global. (PP-PAUD dan Dikmas, 2017, hlm. 2)

Sampai akhir tahun 2018, data yang dirilis Direktorat Guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas menunjukkan bahwa jumlah Guru PAUD sebanyak 649.514 orang, yang tersebar pada PAUD Formal dan PAUD Nonformal (PAUD Formal sebanyak 316.453 orang dan PAUD Non Formal sebanyak 333.061 orang (KB, 248.289 orang; TPA 9.939 orang; SPS 74. 833 orang)). Dari jumlah tersebut, yang berkualifikasi D-4/S1 baru sejumlah 2.824 orang, sedangkan yang lainnya berkualifikasi SLTA atau bahkan SLTP. Atas kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya agar semua guru pada jenjang pendidikan anak usia dini dengan kewenangan yang diembannya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi seharusnya. (PP-PAUD dan Dikmas, 2018, hlm. 2)

Dari data tersebut masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan para guru PAUD di Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kebijakan dalam mempersiapkan sumberdaya unggul dan berkualitas yaitu salah satunya dengan cara meningkatkan kompetensi pendidik PAUD melalui pendidikan dan pelatihan. Kompetensi pendidik PAUD diharapkan akan mengalami peningkatan setelah pendidik mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi yang saling terkait satu sama lain.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan telah merancang Pendidikan dan Latihan (Diklat) Dasar PAUD yang dirancang secara klasikal pembelajaran tatap muka secara langsung. Kemudian pada tahun 2017 PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat dibawah Kemendikbud merancang diklat dasar PAUD dalam jaringan yang melibatkan teknologi informasi dengan menggabungkan tatap muka, *offline*, dan *online (blended learning)*. Dengan kemajuan ini, pendidik tidak lagi hanya belajar secara konvensional dengan mendengarkan ceramah dari fasilitator/narasumber saja, akan tetapi dilatih untuk belajar secara mandiri dengan membaca modul melalui jaringan internet. Keberhasilan terobosan program yang memanfaatkan

jaringan internet ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti konten yang dibutuhkan pendidik, jaringan internet yang mendukung, peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang harus ada, pertemuan tatap muka sebagai bentuk penguatan yang dibantu oleh lembaga mitra dan yang paling utama adalah motivasi dan kemauan dari pendidik itu sendiri untuk berdaya dan profesional.

Model pembelajaran yang dirancang dalam proses pelaksanaan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar bagi Guru PAUD dalam jaringan adalah *blended learning* dimana pola pembelajarannya menggabungkan antara pola pembelajaran tatap muka secara daring yaitu melalui *video conference*, pendampingan oleh mentor dalam penyelesaian tugas mandiri secara daring dan konvensional. Perkembangan teknologi yang semakin pesat berpengaruh terhadap pendidikan sehingga memvariasikan model pembelajaran sangat penting pada saat ini. Salah satu variasi model pembelajaran yang memanfaatkan unsur teknologi namun tidak meninggalkan pembelajaran secara tatap muka adalah *blended learning*. Hal ini dilakukan untuk menjangkau wilayah yang sangat luas dengan penyebaran penduduk yang tidak merata baik perkotaan maupun di pedesaan. Anggaran dan SDM yang terbatas yang dimiliki pemerintah belum dapat menjangkau semua pendidik PAUD dalam penyelenggaraan diklat dasar dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi.

Berdasarkan data PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat tahun 2017 bahwa peserta yang melakukan registrasi diklat dasar PAUD dalam jaringan adalah berjumlah 9.605 orang, sedangkan yang dinyatakan lulus mengikuti diklat yaitu berjumlah 2.608 orang. Data tersebut menjadikan acuan peneliti untuk melakukan kajian terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan diklat dalam hubungannya dengan jumlah lulusan.

Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2019 yang dilakukan oleh PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung diperoleh informasi bahwa capaian standar nasional pendidikan pada aspek standar pendidik dan tenaga kependidikan baru mencapai angka 63%. Hal ini diantaranya disebabkan oleh banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang kualifikasinya tidak sesuai, minimnya pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan PAUD, serta lemah dalam mendokumentasikan sertifikat-sertifikat ijazah, workshop, pelatihan.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Capaian SNP untuk Setiap Standar di Kab./Kota Propinsi Jawa Barat

Standar	TPPA	Isi	Proses	PTK	Sarpras	Pengelolaan	Pembiayaan	Penilaian	Rerata
Rekap Propinsi	73%	55%	75%	59%	77%	52%	39%	75%	63%
Kab. Bandung Barat	93%	75%	92%	77%	85%	69%	46%	90%	78%
Kota Tasikmalaya	86%	70%	91%	77%	89%	70%	47%	91%	78%
Kab. Bekasi	91%	70%	92%	73%	92%	65%	42%	88%	77%
Kab. Garut	94%	73%	84%	67%	83%	63%	44%	96%	75%
Kab. Purwakarta	91%	70%	88%	42%	87%	64%	46%	98%	73%
Kab. Ciamis	89%	68%	83%	62%	88%	60%	46%	90%	73%
Kota Cirebon	97%	56%	84%	55%	85%	59%	44%	86%	71%
Kota Bandung	76%	56%	82%	72%	87%	57%	38%	85%	69%
Kab. Cianjur	76%	58%	82%	71%	78%	53%	44%	84%	68%
Kota Bogor	63%	63%	82%	43%	87%	55%	44%	79%	65%
Kab. Cirebon	71%	65%	79%	56%	72%	56%	44%	79%	65%
Kab. Bandung	77%	56%	76%	63%	81%	54%	37%	72%	65%
Kab. Majalengka	70%	52%	70%	69%	78%	53%	42%	80%	64%
Kab. Pangandaran	72%	52%	79%	51%	78%	53%	44%	84%	64%
Kab. Tasikmalaya	79%	59%	78%	61%	70%	50%	37%	74%	63%
Kota Cimahi	68%	58%	78%	64%	74%	52%	37%	65%	62%
Kab. Sumedang	72%	43%	67%	75%	83%	56%	31%	68%	62%
Kota Depok	69%	58%	75%	54%	78%	47%	40%	67%	61%
Kab. Bogor	64%	56%	71%	61%	72%	49%	34%	72%	60%
Kota Bekasi	61%	42%	73%	60%	84%	46%	35%	68%	59%
Kab. Sukabumi	61%	53%	69%	37%	77%	44%	43%	73%	57%
Kab. Karawang	57%	40%	63%	59%	73%	41%	40%	65%	55%
Kab. Kuningan	68%	52%	67%	51%	68%	45%	29%	60%	55%
Kota Sukabumi	47%	34%	49%	51%	67%	41%	36%	55%	48%
Kab. Subang	55%	38%	56%	35%	57%	33%	32%	63%	46%
Kab. Indramayu	48%	33%	50%	42%	67%	38%	32%	54%	46%
Kota Banjar	74%	39%	52%	36%	47%	27%	16%	31%	40%
Rerata	73%	55%	75%	58%	77%	52%	39%	75%	63 %
Tertinggi	97%	75%	92%	77%	92%	70%	47%	98%	
Terendah	47%	33%	49%	35%	47%	27%	16%	31%	

Komponen utama yang terlibat dalam proses pendidikan dan pelatihan secara *online* (daring) sebagaimana disebutkan di atas adalah mentor yang mendampingi peserta diklat di setiap kabupaten/kota. Mentor disini berperan sebagai fasilitator sekaligus narasumber tingkat lapangan yang akan membantu peserta dimulai dari pendampingan pada saat tatap muka melalui daring sampai

dengan tahap penyelesaian tugas mandiri. Kompetensi yang dimiliki mentor dalam memfasilitasi peserta diklat apalagi menjadi narasumber menjadi sesuatu hal yang sangat penting dipersiapkan sebelum pelaksanaan diklat berjenjang ini.

Tugas utama mentor adalah sebagai berikut: a) Memfasilitasi pendalaman materi diklat pada tutorial daring dan mandiri; b) Mengingatkan peserta untuk menyelesaikan tugas secara daring maupun luring; c) Memberi umpan balik terhadap tugas yang diunggah peserta; d) Memeriksa data yang terekam keaktifan peserta dalam kegiatan daring; e) Mengoreksi dan menilai tugas peserta. f) Menyampaikan laporan hasil belajar peserta pada setiap modul (9 modul) kepada pengampu.

Pendampingan oleh mentor sangat menentukan keberhasilan program pembelajaran diklat PAUD. Hal ini sejalan dengan kajian Ife (1995, hlm. 43), bahwa peran pendamping umumnya sebagai fasilitator, komunikator, katalisator, motivator, dan dinamisator. Seiring dengan pendapat tersebut, maka peran yang dapat dimainkan oleh mentor dalam melaksanakan fungsi pendampingan yaitu (1) *Peran Motivator* sebagai paya yang dilakukan pendamping adalah menyadarkan dan mendorong kelompok untuk mengenali potensi dan masalah, dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan permasalahan itu, (2) *Peran Fasilitator* bahwa pendamping mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan, mengkondisikan iklim kelompok yang harmonis, serta memfasilitasi terjadinya proses saling belajar dalam kelompok, (3) *Peran Katalisator* yaitu pendamping dalam hal ini dapat melakukan aktivitas sebagai penghubung antara kelompok pendampingan dengan lembaga di luar kelompok maupun lembaga teknis lainnya, baik lembaga teknis pelayanan permodalan maupun pelayanan keterampilan berusaha dalam rangka pengembangan jaringan (BPKB Jawa Timur, 2001, hlm. 8).

Berdasarkan hasil penggalan data dan informasi terhadap 11 orang mentor yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, maka didapatkan data bahwa *Pertama*, penunjukkan atau penugasan menjadi seorang mentor yang didukung oleh terbitnya SK mentor. Lima orang menyatakan bahwa dirinya ditunjuk sesuai SK PP-PAUD Dikmas Jawa Barat, empat (4) orang dari Dinas Pendidikan setempat, dan sebanyak dua (2) orang dari organisasi HIMPAUDI; *Kedua*, bahwa tugas mentor yang masih dirasakan sulit oleh responden yaitu harus menguasai dan mempelajari sembilan

modul materi diklat dasar PAUD, belum memahami secara pasti teknik fasilitasi peserta agar dapat aktif dalam kehadiran dalam *video conference (Vicon)*, *whatssapp (wa) grup*, pertemuan tatap muka untuk pembelajaran mandiri, disamping sulitnya koordinasi dengan admin, dinas pendidikan, dan pengampu; *Ketiga*, masih beragamnya persepsi tentang pendampingan terhadap peserta yang terlihat dari pengalaman selama mendampingi yaitu ada yang hanya bertugas ketika mendampingi dalam forum diskusi, hanya aktif pada saat *video conference (Vicon)* dan *whatssapp (wa) grup*, masih terdapat yang belum melakukan pendampingan mandiri, tidak mengecek keaktifan dan keberadaan peserta karena hilangnya kontak peserta tersebut, serta memiliki persepsi yang berbeda dalam penilaian; *Keempat*, persiapan yang dilakukan untuk menjadi mentor sangat terbatas, yaitu hanya diberikan orientasi tidak dalam pelatihan secara khusus untuk mentor, sehingga tugas sebagai mentor dirasakan sangat berat; *Kelima*, peningkatan penguasaan materi bahan pelatihan diklat dasar daring dilakukan mentor melalui kegiatan belajar mandiri secara individual sehingga masih dirasa sangat kurang. Dari jumlah mentor yang diamati, sebagian besar (70%) menyatakan kadang-kadang berupaya meningkatkan penguasaan materi pelatihan, dan hampir setengahnya (30%) menyatakan menguasai materi pelatihan; *Keenam*, tugas yang dianggap sangat sulit dalam melakukan tugas mentor adalah penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung prosedur pelatihan daring, melakukan fasilitasi terhadap peserta agar bisa aktif dan mengerjakan seluruh tugas-tugas yang diberikan oleh pengampu, serta kesulitan untuk memberikan penilaian terhadap peserta; dan *Ketujuh*, pelaksanaan bimbingan terhadap peserta yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan diklat dasar PAUD daring. Dari jumlah mentor yang diteliti, setengahnya (45%) menyatakan selalu melakukan bimbingan untuk mengatasi kesulitan peserta, hampir setengahnya (30%) menyatakan hanya kadang-kadang melakukan bimbingan, dan sedikit sekali (15%) menyatakan tidak pernah melakukan bimbingan.

Hasil pengumpulan data dari lulusan diklat dasar PAUD dalam jaringan (sebanyak 11 orang) yang tersebar di Provinsi Jawa Barat menunjukkan: *Pertama*, seluruh responden berpendapat bahwa pentingnya peran mentor dalam rangka pendampingan diklat dasar PAUD dalam jaringan, karena mereka banyak

membantu dalam mengatasi kesulitan dalam menggunakan aplikasi daring dan mengkaji modul-modul materi PAUD; dan *Kedua*, seluruh peserta lulus diklat dasar PAUD dalam jaringan menyatakan sebanyak setengahnya (45%) bahwa skor nilai yang didapat sebagai hasil usaha sendiri, melalui diskusi dengan teman sejawat, dan bantuan mentor yang selalu mendampingi dalam setiap mengalami kesulitan; hampir setengahnya (30%) menyatakan bahwa nilai yang didapat atas hasil pendampingan mentor; dan hampir sedikit (25%) yang menyatakan sebagai hasil usahanya sendiri dan tidak didampingi mentor, hal ini dikarenakan mentor diminta jawaban terkadang tidak merespon dan sedang membantu peserta lainnya.

Permasalahan lain yang dimiliki mentor adalah ketidakseragaman pengetahuan dan kemampuan terkait pendampingan, dalam pelaksanaan tugas, memfasilitasi pembelajaran mandiri, memotivasi keaktifan, menjamin kehadiran, penguasaan konten PAUD, teknis penguasaan aplikasi dan fasilitasi dalam pendampingan diklat PAUD dalam jaringan. Hal ini disebabkan terdapat beberapa mentor yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1, belum pernah mengikuti Diklat Dasar PAUD, serta belum pernah ada pelatihan calon mentor secara khusus sebagai persiapan pendampingan diklat PAUD dalam jaringan. Didalam makna bahwa permasalahan utama yang dimiliki mentor adalah masih lemahnya kemampuan mentor dalam mendampingi peserta diklat PAUD.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

-Didasarkan atas Latar Belakang Masalah di atas, bahwa mentor masih lemah dalam mendampingi peserta diklat PAUD. Faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan hal tersebut, diantaranya:

- 1) Latar belakang pendidikan mentor yang beragam dan keikutsertaan dalam pelatihan untuk menjadi mentor menjadi faktor penyebab lemahnya strategi pendampingan dan penguasaan bahan latihan yang dibahas dalam diklat PAUD;
- 2) Cakupan bahan latihan yang sangat banyak dan luas, sehingga mentor belum memiliki pengetahuan yang lengkap yang diperlukan dalam mendampingi peserta pelatihan diklat PAUD;
- 3) Model Pelatihan mentor yang memiliki cakupan strategi pendampingan dan

penguasaan bahan ajar diklat PAUD belum dikembangkan secara khusus oleh unit yang bertanggung jawab untuk pengadaan petugas mentor;

- 4) Sumber belajar yang dapat membantu penguatan kemampuan strategi dan bahan ajar diklat PAUD belum disiapkan oleh lembaga, sehingga mentor dituntut untuk mencari secara mandiri;
- 5) Dukungan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya unit yang menangani peningkatan kompetensi pengelola dan Guru PAUD untuk meningkatkan kemampuan mentor dalam menguasai strategi pendampingan dan bahan ajar diklat PAUD.

Melihat luasnya faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan lemahnya kemampuan mentor dalam mendampingi peserta dilat PAUD, maka kajian dalam penelitian ini dibatasi pada faktor model pelatihan mentor, sedangkan pelatihannya akan dilakukan melalui program *blended learning* yang akan dilakukan di Kabupaten Bandung. Berdasarkan pembatasan tersebut maka rumusan masalah penelitian secara umum adalah “Bagaimana pengembangan model pelatihan mentor melalui *blended learning* untuk meningkatkan kemampuan pendampingan diklat PAUD di Kabupaten Bandung?”.

Secara rinci, maka rumusan masalahnya dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kondisi awal pelatihan mentor yang sudah dilakukan dalam pendampingan diklat PAUD di Kabupaten Bandung?
- 2) Bagaimana pengembangan model pelatihan mentor melalui *blended learning* untuk meningkatkan kemampuan pendampingan diklat PAUD di Kabupaten Bandung?
- 3) Bagaimana implementasi model pelatihan mentor melalui *blended learning* untuk meningkatkan kemampuan pendampingan diklat PAUD di Kabupaten Bandung?
- 4) Bagaimana efektivitas model pelatihan mentor melalui *blended learning* untuk meningkatkan kemampuan pendampingan diklat PAUD di Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan model pelatihan mentor melalui *blended learning* untuk meningkatkan kemampuan pendampingan diklat PAUD di Kabupaten Bandung.

Sedangkan secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Mendeskripsikan pelaksanaan pelatihan mentor yang sudah dilaksanakan dalam pendampingan Diklat PAUD di Kabupaten Bandung.
- 2) Menyusun model konseptual pelatihan mentor melalui *blended learning* untuk meningkatkan kemampuan pendampingan diklat PAUD di Kabupaten Bandung.
- 3) Mengimplementasikan model pelatihan mentor melalui *blended learning* untuk meningkatkan kemampuan pendampingan diklat PAUD di Kabupaten Bandung.
- 4) Menguji efektivitas model pelatihan mentor melalui *blended learning* untuk meningkatkan kemampuan pendampingan diklat PAUD di Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian pengembangan model pelatihan mentor melalui *blended learning* untuk meningkatkan kemampuan pendampingan diklat PAUD diharapkan berguna dan memberikan kontribusi baik dari segi teori, kebijakan, praktik, maupun dari segi isu serta aksi sosial sebagai berikut:

- 1) Dari segi teori diharapkan berguna sebagai bahan untuk memperjelas konsepsi tentang peningkatan kemampuan mentor dalam mendampingi peserta diklat PAUD. Penelitian ini menggambarkan sebuah model pelatihan yang memanfaatkan pendekatan *blended learning* yang sesuai dengan peningkatan kemampuan pendampingan peserta diklat yang memiliki keragaman pendidikan dan pengalaman dalam mengelola kegiatan PAUD. Melalui pendekatan *blended learning* diusahakan adanya perpaduan *online* dan tatap muka sehingga peserta memperoleh pengalaman belajar secara konseptual teoritik dengan praktek secara lengkap untuk peningkatan keterampilan pendampingan peserta pelatihan;

- 2) Dari segi kebijakan diharapkan penelitian ini memberikan gambaran hasil penelitian yang dapat memberi alternatif bentuk pelatihan dalam meningkatkan kemampuan pendampingan khususnya maupun kegiatan pelatihan yang memiliki karakteristik yang sama dengan permasalahan yang relevan dan sasaran serta cakupan yang lebih luas;
- 3) Dari segi praktik diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan informasi dan pemecahan masalah berkaitan dengan usaha peningkatan kemampuan pendampingan dan atau memfasilitasi peserta pelatihan dalam peningkatan kemampuan sesuai dengan kepentingannya;
- 4) Dari segi isu serta aksi sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan khasanah ilmu pendidikan khususnya Program Pendidikan Masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Struktur organisasi disertasi merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah (2019, hlm. 21) yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi disertasi.
- 2) Bab II Kajian Pustaka
Bab ini membahas kajian pustaka yang berfungsi sebagai landasan teoretis yang berhubungan dengan masalah penelitian antara lain hakekat pelatihan, hakekat *blended learning*, kompetensi, dan pendampingan.
- 3) Bab III Metode Penelitian
Bab ini membahas desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.
- 4) Bab IV Temuan dan Pembahasan
Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan

temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

5) Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Pada bab ini yang dibahas adalah simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.